



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081  
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755  
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR 660/ 10 /19.1.02.0/BPMPT/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU  
 KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN  
 KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON  
 ENERGI PRASARANA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU  
 PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
  - b. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan telah mendapatkan Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);
15. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3095/Bid.1/2016, tanggal 25 April 2016, hal Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Izin Lingkungan, kepada:
1. Nama Instansi : PT. Cirebon Energi Prasarana
  2. Jenis Usaha : Kegiatan Pembangunan dan dan/atau Kegiatan Operasional PLTU.
  3. Penanggungjawab : President Director PT. Cirebon Energi Prasarana
  4. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 3, Suite 2502 Sultan Iskandar Muda Street Kav. V-TA South Jakarta- Indonesia Telp. (021) 2765 0795 Fax. (021) 2765 0796
  5. Lokasi Kegiatan : Daerah Kabupaten Cirebon.
  6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan Instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimuat dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan ringkasan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : PT. Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Kegiatan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, serta bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.

KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, PT Cirebon Energi Prasarana, wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Desa setempat, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mengenai rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, secara berkesinambungan; dan
3. pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Masa pemberlakuan Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

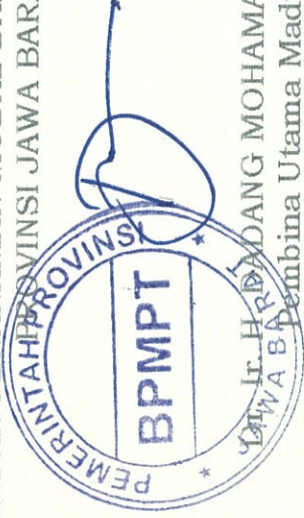
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Bupati Cirebon melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Instansi lain yang terkait Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, menimbulkan dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan kepada Instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **11 MAY 2016**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. H. HR. MOHDANG MOHAMAD, MSCE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601217 198511 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016

TANGGAL : 11 MAY 2016

TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1000 MEGA WATT CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

A. MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1000 MEGA WATT CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>Dampak Penting Yang Dikelola</b>							
<b>A. TAHAP PRA KONSTRUKSI</b>							
1.	Perubahan mata pencaharian	Pengadaan lahan	Terciptanya lapangan kerja dan/atau sumber nafkah baru bagi warga penyewa /penggarap lahan garam atau ikan, dan sawah yang kehilangan sumber mata pencahariannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi terkait rencana pengadaan lahan secara transparan kepada para penggarap lahan milik KLHK yang akan digunakan untuk lokasi tapak proyek PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW.</li> <li>Melakukan pendataan secara rinci/detil terkait kepemilikan dan penguasaan lahan di areal lahan yang dibebaskan</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan  1 (satu) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				yang meliputi : 1) jumlah pemilik lahan yang akan terkena pembebasan, 2), Jumlah penggarap lahan (tambak garam, tambak ikan, dan sawah) di lahan KLHK seluas ± 195 ha, 3). Luas lahan milik dan lahan garapan yang dibebaskan.		Konstruksi dilakukan	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan <i>musyawarah</i> dengan para pemilik lahan yang dibebaskan terkait dengan nilai jual-beli lahan (terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan di tanah timbul yang dikuasai oleh warga sekitar).</li> </ul>		3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membantu KLHK melakukan pendekatan dan musyawarah dengan para penggarap lahan terkait dengan besaran tali asih lahan garapan (tambak garam, tambak ikan dan sawah) yang dibebaskan.</li> </ul>		Selama Tahap Pra Konstruksi	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemrakarsa akan berupaya mencari dan menyediakan alternatif pemecahan masalah hilangnya mata pencaharian para penyewa dan/atau penggarap yang dibebaskan lahan garapannya, setidaknya terdapat beberapa alternatif upaya untuk memecahkan masalah tersebut yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam jangka pendek, pemrakarsa akan mengutamakan para</li> </ol> </li> </ul>		Selama Tahap Pra Konstruksi	



No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>penggarap lahan dan buruh tani yang kehilangan sumber mata pencaharian agar diterima menjadi tenaga kerja pada kegiatan konstruksi pembangunan PLTU selama ± 2 tahun,</p> <p>2. Pemrakarsa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menciptakan peluang berusaha baru bagi para penggarap lahan (petambak garam, petambak ikan, dan petani sawah) yang terkena pembebasan lahan dengan memperhatikan potensi, minat dan peluang berusaha yang tersedia.</p> <p>3. Upaya pengelolaan diprioritaskan kepada kelompok rentan yaitu kepada:</p> <p>1). Penggarap lahan di areal 195 Ha yang berusia lanjut (berusia di atas 54 tahun) yang kemungkinannya kecil untuk dapat direkrut atau bekerja pada kegiatan Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi PLTU, 2). Penggarap lahan di areal 195 ha yang tidak memiliki mata pencaharian lain dan/atau yang sumber pendapatan rumah tangganya dominan bergantung dari lahan garapan tersebut.</p>			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pengadaan lahan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembebasan lahan,</li> </ul>		3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan	
2.	Perubahan pendapatan	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terjadinya kehilangan atau penurunan tingkat pendapatan warga yang selama ini menggarap lahan di areal yang dibebaskan baik sebagai petambak garam, petambak ikan, dan petani sawah beserta dengan buruh tambak/tani.</li> <li>Setelah dilakukan kegiatan pembebasan lahan, tingkat pendapatan warga penggarap lahan minimal sama atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum dilakukannya pembebasan lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan prioritas utama kepada para penggarap lahan yang kehilangan mata pencaharian dalam perekrutan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi.</li> <li>Mengupayakan peluang usaha baru bagi para penggarap yang kehilangan mata pencaharian.</li> <li>Melakukan jalinan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal dalam pengupayaan peluang usaha baru untuk peningkatan pendapatan masyarakat.</li> </ul>	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan</p> <p>Desa Pengarengan</p>	Selama Tahap Pra Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
3.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya persepsi positif masyarakat (terutama para penggarap lahan) terhadap rencana pembangunan PLTU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan semua pengelolaan dampak hilangnya mata pencaharian dan penurunan pendapatan di atas dengan baik dan benar.</li> <li>Membangun wadah</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan	<p>Selama Tahap Pra Konstruksi berlangsung</p> <p>3 (tiga) bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas Sosial Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: Dinas Sosial Kab. Cirebon, BLHD</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terciptanya kondisi lingkungan sosial yang semakin harmonis dan kondusif.</li> </ul>	<p>kelembagaan bersama (bisa berupa forum) yang terdiri atas pemrakarsa, para penggarap, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah (desa, kecamatan dan kabupaten) untuk mencari alternatif terbaik pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mensosialisasikan atau mengkomunikasikan proses dan hasil kegiatan pengadaan lahan kepada <i>stakeholders</i> terkait (masyarakat yang terkena pembebasan lahan, aparat pemerintahan desa dan kecamatan).</li> </ul>	Desa Pengarengan	<p>sebelum kegiatan pembebasan lahan dimulai</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembebasan lahan dimulai</p>	Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
4.	Peningkatan kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<p>Minimum 40% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi diprioritaskan dari tenaga kerja lokal.</p>	<p>Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerimaan tenaga kerja secara transparan dan memberikan kesempatan kerja dan prioritas utama kepada masyarakat di 5 desa studi, minimum sebesar 40% dari total tenaga kerja yang akan diserap pada Tahap Konstruksi.</li> <li>▪ Memasang papan pengumuman secara terbuka di balai desa dan kantor kecamatan yang berkaitan dengan lowongan dan jenis pekerjaan yang dapat diisi</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>masyarakat lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemrakarsa dan kontraktor akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga "Komite Tenaga Kerja Lokal" yang telah dibangun sejak PLTU Cirebon kapasitas 1 x 660 MW dalam melakukan proses perekrutan tenaga kerja lokal, agar proses perekrutan tenaga kerja lokal benar-benar telah memperhatikan dan memprioritaskan pencari kerja yang berasal dari komunitas masyarakat, terutama yang berada dalam ring 1 di desa-desa yang termasuk dalam wilayah studi, dengan tingkat prioritas sebagai berikut :           <p><b>Prioritas utama :</b> warga yang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak dari kegiatan pengadaan lahan, yaitu para penggarap lahan untuk kegiatan tambak garam, tambak ikan dan sawah di areal KLHK beserta dengan buruh-buruh yang terlibat dalam kegiatan tersebut,</p> <p><b>Prioritas kedua :</b> warga pencari kerja (pengangguran) di 5 (lima) desa studi, terutama komunitas yang berbatasan langsung dengan tapak proyek dan diprediksi akan terkena dampak negatif langsung dari kegiatan konstruksi.</p> <p><b>Prioritas ketiga,</b> pencari kerja yang berasal dari kecamatan</p> </li> </ul>		Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sekitarnya di Kabupaten Cirebon.			
5.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkurangnya persepsi negatif dari masyarakat pencari kerja.</li> <li>▪ Rendahnya intensitas keluhan dan protes masyarakat atas rencana pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat terkait jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pada Tahap Konstruksi.</li> <li>▪ Pemrakarsa memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan oleh kegiatan konstruksi, seperti pelatihan keterampilan mengelas, menyambung pipa, memasang peralatan listrik, dan lainnya.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Pra Konstruksi dimulai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
<b>B. TAHAP KONSTRUKSI</b>							
1.	Penurunan kualitas udara ambien	Mobilisasi peralatan dan material	Kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan;</li> <li>▪ Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material terutama di permukiman maks. 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Proses pengangkutan material (tanah gali/ urug) dilengkapi dengan penutup terpal pada saat melewati daerah permukiman;</li> <li>▪ Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan);</li> <li>▪ Melakukan perawatan mesin</li> </ul>	Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material, terutama yang berdekatan dengan permukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru) dan Desa Astanamukti	Pemasangan rambu dilakukan sebelum kegiatan pengurangan; Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan penyiraman minimal dua kali sehari menggunakan <i>water spraying truck</i> pada ruas jalan akses yang tidak diaspal yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin, terutama pada saat musim kemarau dengan mengacu kepada prosedur penyiraman jalan.</li> <li>▪ Membersihkan atau menghilangkan debu pada roda kendaraan dengan <i>wheel washing machine</i></li> <li>▪ Mengikuti <i>Standard Operation Procedure</i> pencegahan pencemaran lingkungan hidup.</li> </ul>			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu yang sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan, termasuk penggunaan <i>exhaust muffler</i> (tabung knalpot).</li> <li>▪ Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan);</li> <li>▪ Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material, terutama di permukiman maks. 20 km/jam;</li> <li>▪ Perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur baku dan ketentuan yang berlaku;</li> </ul>	Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material, terutama yang berdekatan dengan permukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru) dan Desa Astanamukti	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
3.	Peningkatan peluang usaha	Mobilisasi peralatan dan material	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkenadampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.</li> <li>▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut.</li> <li>▪ Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 - 1 mil laut dari garis pantai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi kegiatan mobilisasi peralatan dan material kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek;</li> </ul>	Perkampungan nelayan di wilayah studi	2 (satu) bulan sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon, BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut;</li> </ul>	Jalur mobilisasi peralatan dan material di wilayah kegiatan	2 (dua) minggu sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material dimulai	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area mobilisasi peralatan dan material.</li> </ul>	Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	1 (satu) bulan sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material dimulai	
5.	Perubahan pendapatan	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjadinya peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW</li> <li>▪ Tidak terjadinya penurunan pendapatan para nelayan yang operasi wilayah tangkapan ikannya berada di sekitar kegiatan mobilisasi peralatan melalui laut melalui dermaga sementara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK)</li> <li>▪ Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Persepsi dan sikap masyarakat	Mobilisasi peralatan dan material	Tidak terdapat keluhan warga akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material akibat penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, gangguan nelayan melaut	Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan mobilisasi peralatan dan material yang telah tercantum pada butir 1, 2 dan 4.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
7.	Potensi Gangguan Penyakit/ Kesehatan	Mobilisasi peralatan dan material	Tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA)	Melakukan pengelolaan sumber dampak primer yang terkait dengan penurunan kualitas udara ambien.	Rencana jalan akses di Blok Karangmulya Desa Kanci, Blok Kandawaru (Desa Waruduwur) dan Desa Astanamukti.	Bersamaan dengan dimulainya kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kab. Cirebon dan Dinkes Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar dan Dinkes Kab. Cirebon</li> </ul>
8.	Peningkatan lalu lintas darat (gangguan lalu lintas)	Mobilisasi peralatan dan material	Tidak terjadi kemacetan pada ruas jalan pantura terutama di titik pertemuan dengan jalan akses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengatur keluar masuk kendaraan di titik pertemuan ruas jalan pantura dengan jalan akses masuk proyek</li> <li>▪ Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di titik keluar-masuknya kendaraan proyek ke jalan pantura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Titik pertemuan ruas jalan Pantura dengan jalan akses</li> <li>▪ Jalan akses menuju tapak proyek</li> </ul>	Selama Tahap Kontruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Perhubungan Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Perhubungan Kab. Cirebon, BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
9.	Peningkatan erosi dan sedimentasi	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Konsentrasi TSS dalam air sungai tidak melampaui kondisi rona awal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menutup permukaan tanah dengan terpal atau bahan lainnya pada lahan yang sedang dilakukan pematangan (pengurugan, pemadatan dan perkerasan tanah).</li> <li>▪ Memadatkan tanah urugan untuk mencegah terjadinya erosi <i>gully</i> dan longsor.</li> </ul>	Tapak proyek	Selama kegiatan pematangan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas PSDAP dan BLHD Kab Cirebon.</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas PSDAP, BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jawa Barat</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan <i>sediment trap</i> pada saluran drainase dan <i>outlet</i> kolam penampung sedimen (<i>settling pond</i>) yang dilengkapi filter</li> <li>Pemeliharaan <i>settling pond</i></li> </ul>		<p>Sebelum kegiatan konstruksi dimulai</p> <p>Selama kegiatan pematangan lahan</p>	
10.	Peningkatan debit air larian/limpasan	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Koefisien regim sungai <50 (Permenhut No. 61 tahun 2014 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada tapak proyek.</li> <li>Membuat saluran drainase sekeliling batas luar tapak proyek dengan dimensi yang mampu menampung limpasan permukaan pada periode puncak hujan</li> <li>Membangun <i>settling pond</i> dengan dimensi yang mampu menampung volume limpasan permukaan pada periode puncak hujan.</li> <li>Melakukan pemeliharaan saluran drainase dan <i>settling pond</i>.</li> </ul>	Tapak proyek : lokasi pematangan lahan	<p>Bersamaan dengan dimulainya kegiatan pematangan lahan</p> <p>Sebelum kegiatan konstruksi dimulai</p> <p>Sebelum kegiatan konstruksi dimulai</p> <p>Selama kegiatan konstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab Cirebon.</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar</li> </ul>
11.	Perubahan komunitas flora darat (berkurangnya jumlah dan jenis flora darat)	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas tutupan lahan mangrove yang dibuka <math>\leq 1,64</math> Ha</li> <li>Jumlah dan jenis flora darat, setara dengan kondisi awal atau lebih baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan (<math>\leq 1,64</math> Ha)</li> <li>Menanami dan memelihara jenis vegetasi pantai/mangrove</li> </ul>	<p>Lokasi pematangan lahan</p> <p>Minimal di sepanjang pantai yang termasuk</p>	<p>Sejak kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja dimulai</p> <p>Sejak Tahap Konstruksi dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon, BLHD Kab. Cirebon dan</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					lahan PLTU		BPLHD provinsi Jawa Barat
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10% dari luas dari area PLTU (Permen PU No 41/PRT/M/2007).</li> </ul>	Di dalam area pembangunan PLTU	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	
12.	Perubahan komunitas fauna darat (berkurangnya jumlah dan jenis fauna darat)	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Jumlah dan jenis fauna darat setara dengan kondisi awal/ lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan (<math>\leq</math> 1,64 Ha)</li> <li>Menanami dan memelihara jenis vegetasi pantai/mangrove</li> <li>Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10% dari luas dari area PLTU (Permen PU No 41/PRT/M/2007)</li> </ul>	Lokasi pematangan lahan	Pada saat pematangan lahan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon</li> </ul>
					Minimal di sepanjang pantai yang termasuk lahan PLTU	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	
					Di dalam area pembangunan PLTU	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	
13.	Peningkatan peluang usaha	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi penggarap lahan yang kehilangan sumber mata pencaharian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.</li> <li>Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau ppondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
14.	Perubahan pendapatan	Pematangan lahan dan penyiapan	Terdapat peningkatan pendapatan warga di	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur),	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		areal kerja	sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan catering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.</li> </ul>	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	berlangsung	Tenaga Kerja Kab. Cirebon <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
15.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Tidak terdapat keluhan warga akibat pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja (peningkatan erosi dan sedimentasi dan perubahan komunitas flora darat)</li> <li>Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pematangan lahan dan penyiapan areal kerja melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
						Sebelum kegiatan konstruksi dimulai	
16.	Peningkatan kebisingan	Pembangunan jalan akses	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu (Kep. Men-LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan yang laik jalan</li> <li>Mengatur kecepatan kendaraan proyek maks. 20 km/jam</li> <li>Melakukan kegiatan pada siang hari</li> </ul>	Jalur pembangunan jalan akses	Selama kegiatan pembangunan jalan akses berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas PU Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
17.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur),	Sejak Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		areal kerja	sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan catering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.</li> </ul>	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	berlangsung	Tenaga Kerja Kab. Cirebon <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
15.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Tidak terdapat keluhan warga akibat pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja (peningkatan erosi dan sedimentasi dan perubahan komunitas flora darat)</li> <li>Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pematangan lahan dan penyiapan areal kerja melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
						Sebelum kegiatan konstruksi dimulai	
16.	Peningkatan kebisingan	Pembangunan jalan akses	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu (Kep. Men-LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan yang laik jalan</li> <li>Mengatur kecepatan kendaraan proyek maks. 20 km/jam</li> <li>Melakukan kegiatan pada siang hari</li> </ul>	Jalur pembangunan jalan akses	Selama kegiatan pembangunan jalan akses berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas PU Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
17.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur),	Sejak Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		jalan akses	wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak.	<p>baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkenadampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi.</li> </ul>	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	dimulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
18.	Perubahan pendapatan	Pembangunan jalan akses	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK)</li> <li>▪ Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
19.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan jalan akses	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan jalan akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan jalan akses (peningkatan kebisingan).</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dan</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa	<p>Selama Tahap Konstruksi berlangsung</p> <p>Sebelum kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pembangunan jalan akses melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.	Astanamukti, dan Desa Pengarengan	konstruksi dimulai	Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
20.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.</li> <li>▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
21.	Perubahan pendapatan	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK)</li> <li>▪ Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lembaga koperasi.			
22.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan PLTU dan fasilitasnya (peningkatan peluang usaha).</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pembangunan jalan akses melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
23.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan dermaga	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.</li> <li>▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
24.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi kegiatan pembangunan dermaga kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek;</li> <li>▪ Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkampungan nelayan di wilayah studi</li> <li>▪ Area pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 (satu) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga</li> <li>2 (dua) minggu sebelum kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 - 1 mil laut dari garis pantai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan pembangunan dermaga supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area pembangunan dermaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dermaga di wilayah kegiatan</li> <li>Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembangunan dermaga dimulai</li> <li>1 (satu) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga dimulai</li> </ul>	Cirebon, BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
25.	Gangguan aktivitas budidaya kerang	Pembangunan dermaga (permanen)	Tidak terdapat keluhan dari nelayan budidaya kerang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada nelayan budidaya kerang hijau terkait rumpon yang terkena dampak pembangunan dermaga permanen,</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon) terkait budidaya Tengyong (Kerang Hijau) di wilayah sekitar proyek sesuai dengan peraturan berlaku.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkampungan nelayan di wilayah studi</li> <li>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga</li> <li>Selama pembangunan dermaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon serta BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
26.	Perubahan pendapatan	Pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW</li> <li>Tidak terjadinya penurunan pendapatan para nelayan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK)</li> <li>Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				makanan dan catering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.			
27.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan dermaga	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan dermaga (peningkatan peluang usaha, gangguan aktivitas nelayan melaut, dan gangguan aktivitas budidaya kerang)</li> <li>▪ Memberikan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat nelayan yang berkaitan dengan pembangunan dermaga.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama Tahap Konstruksi berlangsung</p> <p>2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>
28.	Perubahan pendapatan	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadinya penurunan signifikan pendapatan rumah tangga para tenaga kerja lokal yang terkena PHK.</li> <li>• Tidak adanya keluhan dari tenaga kerja yang terkena PHK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Memberikan informasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja minimal 6 bulan sebelumnya agar para pekerja dapat mempersiapkan diri untuk mencari alternatif mata pencaharian lain.</li> <li>• Mengupayakan terciptanya peluang usaha baru melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, misalnya Dinas Tenaga Kerja.</li> <li>• Meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat kerjasama dengan Pemerintah</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Pada akhir masa kerja pada tahap Konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan BLHD Kabupaten Cirebon.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Daerah.			
29.	Peningkatan keterampilan	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	Terjadinya peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja lokal setelah pelepasan tenaga kerja.	Mengupayakan kegiatan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan minat/kebutuhan, bakat dan potensi tenaga kerja lokal serta potensiusaha yang dapat dikembangkan di sekitar lokasi kegiatan.	PT. CEPR., khususnya bidang yang menangani pengembangan sumberdaya manusia perusahaan.	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan BLHD Kabupaten Cirebon.</li> </ul>
30.	Peningkatan kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	Minimum 40% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi diprioritaskan dari tenaga kerja lokal.	Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja, melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerimaan tenaga kerja secara transparan dan memberikan kesempatan kerja dan prioritas utama kepada masyarakat di 5 desa studi, minimum sebesar 40% dari total tenaga kerja yang akan diserap pada Tahap Konstruksi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon, BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memasang papan pengumuman secara terbuka di balai desa dan kantor kecamatan yang berkaitan dengan lowongan dan jenis pekerjaan yang dapat diisi masyarakat lokal.</li> </ul>		3 (tiga) bulan sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	
31.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	Tidak terdapat keluhan warga dan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan upaya pengelolaan dampak primer sesuai dengan yang direncanakan (peningkatan kesempatan kerja).</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi terkait</li> </ul>		2 (dua) bulan	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				rencana perekrutan tenaga kerja, terutama mengenai keterbatasan jumlah tenaga kerja yang dapat direkrut pada Tahap Operasi.		sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	Cirebon
				• Perekrutan tenaga kerja untuk Tahap Operasi dengan mengutamakan tenaga kerja lokal yang telah direkrut pada Tahap Konstruksi		Selama penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	
<b>C. TAHAP OPERASI</b>							
1.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut.</li> <li>Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 - 1 mil laut dari garis pantai.</li> </ul>	<p>Sosialisasi kegiatan operasional dermaga kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek;</p> <p>Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut;</p> <p>Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan operasional dermaga supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area operasional dermaga.</p>	<p>Perkampungan nelayan di wilayah studi</p> <p>Area operasional dermaga</p> <p>Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</p>	<p>2 (dua) bulan sebelum kegiatan operasional dermaga</p> <p>2 (dua) minggu sebelum kegiatan operasional dermaga dimulai</p> <p>1 (satu) bulan sebelum kegiatan operasional dermaga dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>
2.	Persepsi dan sikap masyarakat	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	Tidak terdapat keluhan dari nelayan di wilayah studi.	Melakukan upaya dan rencana pengelolaan dampak primer kegiatan operasional dermaga (gangguan aktivitas nelayan melaut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunitas nelayan di Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti,</li> </ul>	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>dan Desa Pengarengan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi perairan laut di sekitar operasional dermaga (<i>dermaga</i>) bongkar muat batubara.</li> </ul>		
3.	Penurunan kualitas udara ambien	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	<p>Kegiatan penanganan batubara di <i>stockyard</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memasang penutup pada jalur conveyor:</li> <li>▪ Memasang pagar pemecah angin (<i>wind breaker fence</i>) mengelilingi <i>stockyard</i></li> <li>▪ Memastikan instalasi sistem penyemprotan air (<i>water spray</i>) bekerja dengan baik dan optimal.</li> <li>▪ Menanam pohon jenis lokal sebagai <i>green belt</i> di sekeliling <i>stockyard</i></li> </ul>	Area sekitar <i>stockyard</i>	Dilakukan sejak awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Tidak terdapat keluhan warga akibat penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Melaksanakan seluruh rencana pengelolaan bagi dampak penurunan kualitas udara ambien dan gangguan kesehatan yang memberikan dampak turunan terhadap persepsi dan sikap masyarakat.	Lokasi pemukiman penduduk yang berdekatan dengan lokasi penyimpanan batubara di <i>stockyard</i> sesuai dengan hasil perkiraan sebaran dampak penurunan kualitas udara ambien.	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Gangguan Penyakit	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Tidak ada peningkatan kasus gangguan sistem pernafasan (ISPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara</li> <li>Melakukan program pelayanan kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan tentang Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat.</li> </ul>	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa</p> <p>Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</p>	<p>Selama Tahap Operasi berlangsung</p> <p>Setiap 6 (enam) bulan sekali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: Dinkes &amp; BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon &amp; BPLHD Prov. Jabar</li> </ul>
6.	Penurunan kualitas udara ambien	Operasional unit PLTU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas udara ambien (konsentrasi Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), dan partikulat (TSP, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>) tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien (PP RI No. 41/1999)</li> <li>Emisi Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), Total Partikulat), dan Opasitas (Lampiran 1A) tidak melebihi baku mutu (PerMenLH No 21 Tahun 2008)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan cerobong (<i>chimney</i>) dibangun dengan ketinggian 200 meter dan menggunakan batubara dengan kandungan rendah sulfur (rata-rata 0,37%)</li> <li>Memastikan peralatan kendali pencemar udara beroperasi dengan baik dan optimal (<i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP) dan <i>Flue Gas Desulphurixation</i> (FGD))</li> </ul>	<p><i>Powerblock (steam generator boiler)</i> unit PLTU</p>	<p>Dilakukan sejak awal Tahap Konstruksi</p> <p>Selama Tahap Operasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon &amp; BPLHD Prov. Jabar</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Peningkatan kebisingan	Operasional unit PLTU	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menempatkan alat-alat mekanikal sumber bising di dalam ruangan tertutup yang dilengkapi peredam suara.</li> <li>Menanam pohon di sekeliling area PLTU sebagai <i>green barrier</i>.</li> </ul>	Area power block PLTU	Dilakukan sejak awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar</li> </ul>
8.	Penurunan kualitas air laut	Operasional unit PLTU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air laut memenuhi baku mutu KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004</li> <li>Baku mutu effluent limbah cair sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 Lampiran I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola limbah cair</li> <li>Memasang <i>flow meter</i></li> <li>Membangun dinding pencegah longsor batubara agar tidak ada batubara yang masuk ke saluran air larian batubara</li> <li>Memisahkan saluran air larian batubara dengan saluran air hujan</li> <li>Pada saat pembangunan <i>stockyard</i> dilengkapi dengan membuat kolam penampungan (pit) untuk menampung air yang terkontaminasi batubara</li> <li>Membuat <i>small bund</i> (penahan air yang terkontaminasi batubara) yang jatuh ke laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>di WWTP</li> <li>di setiap titik penataan untuk mengukur debit air</li> <li>Di sekeliling <i>stockyard</i></li> <li>Di sekeliling <i>stockyard</i></li> <li>Di <i>stockyard</i></li> <li>sepanjang jetty dan dermaga</li> </ul>	Sejak Tahap Operasional dimulai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon</li> </ul>
9.	Perubahan komunitas biota laut	Operasional unit PLTU	Struktur komunitas biota air laut (bentos dan nekton) setara dengan kondisi awal	Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas air laut	Area PLTU	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Peningkatan peluang usaha	Operasional unit PLTU	Adanya masyarakat setempat yang memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang berusahaketika kegiatan operasional PLTUCirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.</li> <li>▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada tahap operasi .</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>
11.	Perubahan pendapatan	Operasional unit PLTU	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK)</li> <li>▪ Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Persepsi dan sikap masyarakat	Operasional unit PLTU	Tidak terdapat keluhan warga akibat operasional unit PLTU	Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan operasional unit PLTU (penurunan kualitas udara ambien, kebisingan, penurunan kualitas air laut, dan peningkatan peluang usaha)	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>
				Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari operasional unit PLTU melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.		Sebelum kegiatan Operasional unit PLTU dimulai	
13.	Gangguan Penyakit	Operasional unit PLTU	Tidak ada peningkatan kasus gangguan sistem pernafasan (ISPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara</li> </ul>	Area PLTU	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: Dinkes Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon &amp; BPLHD Prov. Jabar</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan program pelayanan kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan tentang Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat.</li> </ul>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi berlangsung	
14.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penyimpanan sementara abu batubara	Tidak terdapat keluhan warga akibat penyimpanan sementara abu batubara	Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan operasional unit PLTU (penurunan kualitas udara ambien)	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>
15.	Gangguan penyakit	Penyimpanan sementara abu batubara	Tidak ada peningkatan kasus gangguan sistem pernafasan (ISPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara</li> </ul>	Area PLTU	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kab. Cirebon dan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan program pelayanan</li> </ul>	Blok Kandawaru	Setiap 6 (enam)	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan tentang Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat.	(Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	bulan sekali selama Tahap Operasi berlangsung	▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>D. Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dikelola</b>							
1.	Penurunan kualitas air permukaan	Pengecatan, sisa bahan kimia dan bahan lainnya yang digunakan pada saat pembangunan PLTU dan fasilitasnya, khususnya <i>batching plant</i>	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai aturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pengolahan air limbah untuk setiap fasilitas yang menghasilkan air limbah selama Tahap Konstruksi, seperti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk <i>batching plant</i> dengan membangun <i>settling pond</i> dan filterisasi.</li> <li>Untuk sisa pengecatan dan bahan kimia lain dibuatkan tempat penyimpanan sementara yang kedap air.</li> <li>Untuk sumber limbah lain akan dibuatkan instalansi air limbah yang disesuaikan dengan fungsinya.</li> </ul> </li> </ul>	Tapak Proyek	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon &amp; BPLHD Prov Jabar</li> </ul>
2.	Penurunan kualitas air tanah	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas air tanah di lokasi pemukiman (sumur penduduk) memenuhi Baku Mutu sesuai dengan PerMenKes No. 416 tahun 1990</li> <li>Kualitas air sumur pantau memenuhi kondisi alami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kolam penampung (<i>coal runoff pond</i>) bekerja dengan baik dan optimal</li> <li>Membuat sumur pantau (<i>monitoring well</i>)</li> <li>Menggunakan lapisan <i>gravel base coarse, sand, lapisan impermeable geotextile berupa non woven fabric dan HDPE High Dencity Polyetylene</i> pada tempat penimbunan batubara.</li> </ul>	Tempat penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Saat awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon &amp; BPLHD Prov Jabar</li> </ul>
3.	Penurunan sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja</li> <li>Pembangunan</li> </ul>	Sanitasi lingkungan di sekitar tapak proyek baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan tempat penampungan limbah padat kegiatan konstruksi</li> <li>Membangun <i>Sewage Treatment Plant (STP)</i> untuk</li> </ul>	Tapak proyek	Saat awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW.			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		jalan akses <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan PLTU dan fasilitasnya</li> <li>▪ Operasional unit PLTU</li> </ul>		Tahap Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) untuk Tahap Operasi</li> <li>▪ Menyediakan tempat penampungan sampah non B3 untuk Tahap Konstruksi</li> <li>▪ Menyediakan tempat penampungan sampah non B3 untuk Tahap Operasi</li> <li>▪ Menyediakan fasilitas MCK yang memadai</li> <li>▪ Melakukan himbauan kepada pekerja konstruksi untuk berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS).</li> </ul>			BPLHD Prov. Jabar
4.	Limbah B3	Kegiatan konstruksi & Operasi PLTU	Tidak ada pencemaran limbah B3 ke lingkungan sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengacu pada Peraturan pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan CEPR bekerjasama dengan kontraktor yang memiliki izin dan pengelolaan limbah B3;</li> <li>▪ Membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 selama kegiatan konstruksi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW</li> <li>▪ Membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 selain fly ash, bottom ash dan gipsum selama kegiatan</li> </ul>	Tapak proyek	Selama Tahap Konstruksi & Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksana: PT. CEPR</li> <li>▪ Pengawas: BLHD Kab. Cirebon</li> <li>▪ Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar</li> </ul>

B. MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1000 MEGA WATT CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
<b>Dampak Penting Yang Dipantau</b>									
<b>A. TAHAP PRA KONSTRUKSI</b>									
1.	Perubahan mata pencaharian	Jumlah penggarap yang kehilangan mata pencaharian atau yang beralih mata pencaharian, meliputi penggarap lahan/petambak garam, petambak ikan, petani padi sawah, serta buruh yang bekerja pada masing-masing kegiatan garapan tersebut.  jumlah dan jenis kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemrakarsa kepada para penggarap lahan	Pengadaan lahan	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> Sensus terhadap semua penggarap lahan di wilayah studi  <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif	di Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.  Kantor PT. CEPR	Frekuensi Pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan	PT. CEPR	Kantor Pertanahan Kab. Cirebon	Kantor Pertanahan Kab. Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
2.	Perubahan pendapatan	Tingkat pendapatan para penggarap lahan	Pengadaan lahan	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> Wawancara mendalam (studi kasus) terhadap para penggarap dan buruh. Sampling dengan menggunakan	Pemukiman penduduk dimana para penggarap dan buruh tani menetap di Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan	Frekuensi Pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>kuisi onterstruktur tentang pendapatan rumah tangga penggarap lahan (petambak garam, petambak ikan, petani sawah) dan para buruh yang menggantungkan mata pencahariannya di areal seluas ±195 ha.</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/ atau kualitatif</p>	Desa Pengarengan.				
3.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> <li>▪ Jumlah keluhan terkait kegiatan pengadaan lahan.</li> </ul>	Pengadaan lahan	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi dokumentasi foto survei dan wawancara</li> <li>▪ Survei terhadap masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/ atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR. (Bidang CSR).</li> </ul>	Frekuensi Pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan	PT. CEPR	Dinas Sosial Kab. Cirebon	BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
4.	Peningkatan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data jumlah dan kriteria tenaga kerja lokal yang direkrut</li> <li>• Tersedianya media pengumuman di balai desa di 5 desa studi.</li> <li>• Proporsi tenaga kerja lokal terhadap total tenaga kerja konstruksi minimal sebesar</li> </ul>	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara secara mendalam dengan wakil masyarakat dalam Komite tenaga kerja lokal yang dibentuk.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi tenaga kerja yang direkrut dari HRD PT. CEPR dan foto pengumuman rekrutment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bidang HRD)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		40%. • Memastikan bahwa pemrakarsa dan kontraktor telah bekerjasama dengan <b>Komite Tenaga Kerja Lokal</b> dalam proses perekrutan tenaga kerja konstruksi.		<b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif					
5.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> <li>▪ Jumlah keluhan terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi</li> </ul>	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi dokumentasi foto survei dan wawancara</li> <li>▪ Survei terhadap masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR. (Bidang CSR).</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
<b>B. TAHAP KONSTRUKSI</b>									
1.	Penurunan kualitas udara ambien	Parameter TSP, PM <sub>10</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan CO	Mobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan sampel TSP mengacu pada SNI-19-7119.3-2005;</li> <li>▪ Pengambilan sampel PM<sub>10</sub> mengacu pada USEPA IO-2.1;</li> <li>▪ Pengambilan sampel SO<sub>2</sub> mengacu pada SNI-19.7119.7-2005;</li> </ul>	Jalur mobilisasi peralatan dan material yang terdekat dengan pemukiman, yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada koordinat 108° 37' 31.646" BT; 6° 46' 58.051" LS</li> <li>• Pada</li> </ul>	3(Tiga) bulan sekali selama mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon; BPLHD Provinsi Jawa Barat



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan sampel NO<sub>2</sub> mengacu pada SNI-19-7119.2-2005;</li> <li>▪ Pengambilan sampel CO mengacu pada SNI 7119.10:2011;</li> <li>▪ Pengamatan langsung dan dokumentasi untuk kegiatan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembersihan terhadap ban truk yang keluar dari tapak proyek</li> <li>- Perawatan rutin kendaraan proyek</li> <li>- Kegiatan penyiraman jalan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Analisis laboratorium yang terakreditasi KAN dan dilakukan berdasarkan pada pedoman "SNV" dan membandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan.</p>	koordinat 108° 38' 3.948"BT; 6° 47' 8.242"LS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada koordinat                108° 37'                49.134" BT;                6° 46'                34.357"LS</li> </ul>				
2.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan (dBA)	Mobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b> Data kebisingan diukur dengan menggunakan <i>soundlevel meter</i> dan dihitung Ls, Lm dan Lsm sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996</p>	Jalur mobilisasi peralatan dan material yang terdekat dengan pemukiman di wilayah studi, yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada koordinat</li> </ul>	3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon; BPLHD Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>Tentang Baku Tingkat Kebisingan.</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MEN LH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan peruntukkan pemukiman, yaitu 55+3 dB(A).</p>	<p>108° 37' 31.646" BT; 6° 46' 58.051" LS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada koordinat 108° 38' 3.948"BT; 6° 47' 8.242"LS</li> <li>• Pada koordinat 108° 37' 49.134" BT; 6° 46' 34.357"LS</li> </ul>				
3.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul</li> <li>▪ jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan</li> </ul>	Mobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/ atau kualitatif</p>	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, BLHD Kabupaten Cirebon. BPLHD Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Keluhandarinelayan terkait kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Mobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</li> <li>Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas nelayan melaut di jalur mobilisasi peralatan dan material dan jumlah keluhan yang masuk ke PLTU</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkampungan nelayan di wilayah studi</li> <li>Jalur mobilisasi peralatan dan material di wilayah kegiatan</li> <li>Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
5.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>Tingkat pendapatan nelayan.</li> </ul>	Mobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <p>Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan nelayan.</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
6.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi</li> </ul>	Mobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Survei menggunakan kuesioner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>BPLHD Provinsi</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		negatif.  Jumlah keluhan terkait kegiatan mobilisasi peralatan dan material		terstruktur dan wawancara mendalam.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/ atau kualitatif.	Astanamukti, dan Desa Pengarengan  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</li> </ul>	konstruksi			Jawa Barat.
7.	Gangguan Penyakit (gangguan kesehatan)	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)	Mobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data bulanan kasus penyakit dari Puskesmas;</li> <li>Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA);</li> <li>Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.	Puskesmas setempat  permukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru) dan Desa Astanamukti	3 bulan sekali setelah dimulainya kegiatan mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	Dinkes Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon, BPLHD Prov. Jawa Barat dan Dinkes Kab. Cirebon
8.	Peningkatan lalu lintas darat (gangguan lalu lintas darat)	Tidak terjadi kemacetan pada ruas jalan pantura terutama di titik pertemuan dengan	Mobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi secara langsung</li> <li>Studi dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Titik pertemuan ruas jalan Pantura dengan jalan akses</li> <li>Jalan akses menuju tapak</li> </ul>	Hari libur dan hari kerja dengan frekuensi 3 kali selama masa	PT. CEPR	Dishub Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon, Dishub Kab. Cirebon & BPLHD Prov.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		jalan akses.		<p>meliputi foto kondisi lalu lintas di titik pertemuan dengan jalan akses, keberadaan rambu-rambu lalu lintas di titik keluar masuknya kendaraan proyek</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V/C ratio mengacu kepada MKJI (1997).</li> </ul>	proyek	<p>mobilisasi peralatan dan material berlangsung</p>			Jabar
9.	Peningkatan erosi dan sedimentasi	Konsentrasi TSS dalam air sungai	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sampel air sebanyak 1 sampel di setiap outlet</li> <li>Pengambilan sampel air di badan air penerima dengan ketentuan sebagai berikut: - apabila ke sungai sebanyak 2 titik, yaitu sebelum dan sesudah pertemuan dengan badan air - apabila ke laut sebanyak 1 titik.</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b></p> <p>Analisis laboratorium sampel air untuk parameter TSS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Outlet settling pond dan</li> <li>Badan air penerima</li> </ul>	Dilakukan 3 bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar
10.	Peningkatan debit air larian/limpasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada pematangan lahan diluar tapak proyek</li> </ul>	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi lapangan terhadap kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pematangan lahan</li> </ul>	3 (tiga) bulan sekali selama	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya saluran drainase di sekeliling luar tapak proyek</li> <li>Kedalaman air pada <i>settling pond</i></li> </ul>		<p>pematangan lahan dan penyiapan area kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengukur kedalaman air pada <i>settling pond</i></li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>settling pond</i></li> </ul>	<p>pematangan lahan dan penyiapan areal kerja.</p> <p>1 (satu) bulan sekali selama pematangan lahan dan penyiapan areal kerja.</p>			
11.	Perubahan komunitas flora darat (berkurangnya jumlah dan jenis flora darat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutupan dan ketebalan mangrove di area proyek</li> <li>Keberhasilan tumbuh</li> <li>Jumlah dan jenis flora darat</li> </ul>	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b> Pengamatan dan pengukuran menggunakan GPS atau citra satelit;</p> <p>Mengukur persentase tumbuh tanaman mangrove yang ditanam</p> <p>Inventarisasi jenis</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>Di lokasi penanaman mangrove</p> <p><u>Lokasi transek 1:</u> 108° 37' 39.456"BT 6° 46' 17.329"LS</p> <p>Di kawasan RTH di dalam area PLTU dan lokasi penanaman mangrove</p> <p><u>Lokasi RTH atau di dalam area PLTU:</u> 108° 37' 48.373" BT 6° 46' 39.361"LS</p>	3 (tiga) bulan sekali setelah kegiatan penanaman dimulai	PT. CEPR	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar
12.	Perubahan komunitas fauna darat	Jumlah jenis dan jumlah individu	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b> Pengamatan secara</p>	Hutan mangrove di sekitar PLTU, yaitu pada koordinat	3 (tiga) bulan sekali	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				langsung di lapangan: Kegiatan inventarisasi jenis-jenis fauna dengan metode <i>Visual Encounter Survey</i> (VES), penjelajahan jalur dan <i>Index Point of Abundance</i> (IPA). <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	berikut: <u>Lokasi transek 1:</u> 108° 37' 39.456"BT 6° 46' 17.329"LS <u>Lokasi RTH atau di dalam area PLTU:</u> 108° 37' 48.373" BT 6° 46' 39.361"LS	setelah setelah penanaman mangrove dimulai			Jabar
13.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul</li> <li>▪ jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan</li> </ul>	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PLTU (Bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama TahapKons truksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
14.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>▪ Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU. <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>

No	Dampak lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
15.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> </ul>	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLH Provinsi Jawa Barat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan terkait kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif					
16.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan	Pembangunan jalan akses	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> Mengukur kebisingan menggunakan <i>soundlevel meter</i> dan dihitung Ls, Lm dan Lsm sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.	Lokasi pembangunan jalan akses terdekat dengan pemukiman penduduk. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada koordinat 108° 37' 31.646" BT; 6° 46' 58.051" LS</li> <li>Pada koordinat 108° 38' 3.948" BT; 6° 47' 8.242" LS</li> </ul>	Sekali selamapembangunan jalan akses pada saat intensitas tinggi	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan peruntukkan pemukiman, yaitu 55+3 dB(A).					
17.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul</li> <li>▪ jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan</li> </ul>	Pembangunan jalan akses	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PLTU</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
18.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>▪ Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>	Pembangunan jalan akses	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <p>Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
19.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai</li> </ul>	Pembangunan jalan akses	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blok Kandawaru (Desa Waruduwur).</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLH Provinsi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		persepsi negatif.		menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	masa konstruksi			Jawa Barat
		Jumlah keluhan terkait kegiatan Pembangunan jalan akses		<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan Pembangunan jalan akses</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor PT. CEPR</li> </ul>				
20.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul</li> <li>jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan</li> </ul>	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<b>Metode pengumpulan data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Survei dengan wawancara mendalam.</li> <li>Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>Kantor PLTU (Bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
21.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tidak bekerja di PLTU. <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif					▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat
22.	Persepsi dan sikap masyarakat	▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<b>Metode pengumpulan data :</b>  Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLH Provinsi Jawa Barat
		▪ Jumlah keluhan terkait kegiatan pembangunan PLTU dan fasilitasnya		▪ Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja  <b>Metode Analisis Data :</b> Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif					
23.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul</li> <li>▪ jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan</li> </ul>	Pembangunan dermaga	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
24.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Keluhan dari nelayan terkait kegiatan pembangunan dermaga	Pembangunan dermaga	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas nelayan melaut di area pembangunan dermaga dan jumlah keluhan yang masuk ke PLTU</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/ atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkampungan nelayan di wilayah studi</li> <li>▪ Area pembangunan dermaga</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
25.	Gangguan aktivitas budidaya kerang	Adanya keluhan dari nelayan budidaya kerang hijau di wilayah studi terkait kegiatan pembangunan dermaga	Pembangunan dermagapermanen sepanjang 2,7 Km.	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas budidaya kerang di area pembangunan dermaga</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkampungan nelayan di wilayah studi</li> <li>▪ Area pembangunan dermaga</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				deskriptif kualitatif					
26.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>	Pembangunan dermagapermanen sepanjang 2,7 Km.	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <p>Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b></p> <p>Deskriptif kualitatif dan kuantitatif</p>	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
27.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> </ul>	Pembangunan dermaga permanen sepanjang 2,7 Km.	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <p>Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLH Provinsi Jawa Barat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan terkait kegiatan pembangunan dermaga</li> </ul>		<p>Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b></p> <p>Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif</p>	Kantor PT. CEPR (bagian CSR)				
28.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	<p><b>Metode pengumpulan data :</b></p> <p>Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> <li>BPLHD</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif					Provinsi Jawa Barat
29.	Peningkatan keterampilan	Meningkatnya kemampuan ( <i>skill</i> ) tenaga kerja lokal yang terkena atau akan terkena PHK	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi jumlah pelatihan keterampilan serta jumlah tenaga kerja lokal yang memperoleh pelatihan selama Tahap Konstruksi</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bidang HRD)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi dan 6 (enam) bulan setelah kegiatan pelepasan tenaga kerja.	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>• BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</li> </ul>
30.	Peningkatan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data jumlah dan kriteria tenaga kerja lokal yang direkrut</li> <li>• Tersedianya media pengumuman di balai desa di 5 desa studi.</li> <li>• Proporsi tenaga kerja lokal terhadap total tenaga kerja Tahap Operasional</li> </ul>	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara secara mendalam dengan wakil masyarakat dalam Komite tenaga kerja lokal yang dibentuk.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi tenaga kerja yang direkrut dari HRD PT. CEPR dan foto pengumuman rekrutment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bidang HRD)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		minimal sebesar 40%. • Memastikan bahwa pemrakarsa dan kontraktor telah bekerjasama dengan <b>Komite Tenaga Kerja Lokal</b> dalam proses perekrutan tenaga kerja Tahap Operasional.		<b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/ atau kualitatif					
31.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> <li>▪ Jumlah keluhan terkait kegiatan Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional</li> </ul>	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi dokumentasi foto survei dan wawancara</li> <li>▪ Survei terhadap masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.</li> </ul> <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR. (Bidang CSR).</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLH Provinsi Jawa Barat
<b>C. TAHAP OPERASI</b>									
1.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Keluhan dari nelayan terkait kegiatan operasional dermaga	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surveidengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkampungan nelayan di wilayah studi</li> <li>▪ Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>meliputi foto aktivitas nelayan melaut di jalur mobilisasi peralatan dan material dan jumlah keluhan yang masuk ke PLTU</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>				Cirebon.	Kelautan Kab. Cirebon.
2.	Persepsi dan sikap masyarakat	<p>Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</p> <p>Jumlah keluhan terkait kegiatan operasional dermaga</p>	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	<p><b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</p> <p>Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan operasional dermaga</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif.</p>	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</p> <p>Kantor PT. CEPR (bagian CSR)</p>	6 (enam) bulan sekali sejak Tahap Operasi dimulai	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Jawa Barat.</li> </ul>
3.	Penurunan kualitas udara ambien	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan penanganan batubara di stockyard sesuai dengan rencana pengelolaan</li> <li>▪ TSP dan PM<sub>10</sub></li> </ul>	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b> Pengamatan langsung penanganan batubara di <i>stockyard</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan sampel TSP mengacu pada SNI-19-7119.3-2005;</li> <li>▪ Pengambilan sampel PM<sub>10</sub> mengacu pada</li> </ul>	<p>Area <i>stockyard</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di area <i>stockyard</i>, yaitu titik koordinat: 108° 37' 48.646"BT; 6°</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali sejak Tahap Operasi dimulai	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat



No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				USEPA IO-2.1;  <b>Metode Analisis Data :</b> Melakukan analisis laboratorium yang terakreditasi KAN KAN dan dilakukan berdasarkan pada pedoman "Standard Nasional Indonesia" dan membandingkan dengan baku mutu	46° 25.834"LS  • Di permukiman terdekat dengan stockyard, yaitu titik koordinat : Permukiman I : 108° 37' 42.341"BT; 6° 47' 2.022"LS Permukiman II : 108° 38' 5.607" BT; 6° 47' 10.369" LS				
4.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> <li>▪ Jumlah keluhan terkait kegiatan pembangunan dermaga</li> </ul>	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	<b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.  Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja  <b>Metode Analisis Data :</b> Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan  Kantor PT. CEPR (bagian CSR)	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLH Provinsi Jawa Barat
5.	Gangguan penyakit	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumpulan data bulanan kasus penyakit dari Puskesmas;</li> <li>▪ Wawancara dengan masyarakat</li> </ul>	Puskesmas setempat  Blok Kandawaru (Desa Waruduwur),	6 bulan sekali setelah dimulainya kegiatan Penyimpanan batubara di	PT. CEPR	Dinkes Kab. Cirebon	Dinkes & BLHD Kab. Cirebon dan Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA); ▪ Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan <b>Metode Analisis Data :</b> Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<i>stockyard</i>			
6.	Penurunan kualitas udara ambien	▪ Parameter Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> ), Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ), CO dan partikulat (TSP, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> ) sesuai PP RI No. 41/1999). ▪ Parameter Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> ), Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ), Total Partikulat, dan Opasitas sesuai PerMenLH No 21 Tahun 2008.	Operasional unit PLTU	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan dengan cara manual dengan metode : ▪ Pengambilansampel TSP mengacu pada SNI-19-7119.3-2005; ▪ Pengambilan sampel PM <sub>10</sub> mengacu pada USEPA IO-2.1; ▪ Pengambilan sampel PM <sub>2,5</sub> mengacu pada USEPA IO-2.1; ▪ Pengambilan sampel SO <sub>2</sub> mengacu pada SNI-19.7119.7-2005; ▪ Pengambilan sampel NO <sub>2</sub> mengacu pada SNI-19-7119.2-2005; ▪ Pengambilan	Area tapak proyek dan pemukiman terdekat dengan area unit PLTU yaitu Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan  Lokasi 1: 108° 37' 48.646" BT; 6° 46' 25.834" LS  Lokasi 2: 108° 37' 15.423" BT 6° 46' 52.424" LS  Lokasi 3: 108° 37' 42.341" BT; 6° 47' 2.022" LS	Cara manual : setiap 6 (enam) bulan sekali  CEMS: setiap hari selama 24 jam	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon & BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>sampel CO mengacu pada SNI 7119.10:2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantauan kualitas udara emisi dilakukan dengan menggunakan CEMS yang terkalibrasi untuk parameter Total Partikulat, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> dan opasitas.</li> <li>▪ Pemeriksaan terhadap dokumentasi terkait dengan operasional ESP, FGD, fabric filter dan <i>Low NOx burner</i> berfungsi baik dan optimal</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Melakukan analisis laboratorium yang terakreditasi KAN KAN dan dilakukan berdasarkan pada pedoman "Standard Nasional Indonesia" dan membandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan.</p>	<p>Lokasi 4: 108° 38' 5.607" BT; 6° 47' 10.369" LS</p> <p>Lokasi 5: 108° 38' 44.940" BT 6° 47' 12.977" LS</p> <p>Lokasi 6: 108° 38' 52.659" BT 6° 46' 51.694" LS</p>				
7.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan sesuai dengan KepMenLH No. 48 tahun 1999 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Operasional unit PLTU	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengamatan langsung pelaksanaan pengelolaan dampak</li> </ul>	Area power Block PLTU dan sekitar PLTU	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				kebisingan sesuai dengan rencana, antara lain terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan alat-alat mekanikal sumber bising</li> <li>- Penanaman pohon di sekeliling area PLTU sebagai <i>green barrier</i>.</li> </ul>					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengukur kebisingan menggunakan <i>soundlevel meter</i> dan dihitung <math>L_s</math>, <math>L_M</math> dan <math>L_{SM}</math></li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Membandingkan tingkat kebisingan dengan baku mutu menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.</p>	Lokasi 1: 108° 37' 48.646" BT; 6° 46' 25.834" LS  Lokasi 2: 108° 37' 15.423" BT 6° 46' 52.424" LS  Lokasi 3: 108° 37' 42.341" BT; 6° 47' 2.022" LS  Lokasi 4: 108° 38' 5.607" BT; 6° 47' 10.369" LS  Lokasi 5: 108° 38' 44.940" BT 6° 47' 12.977" LS  Lokasi 6: 108° 38' 52.659" BT				

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
8.	Penurunan kualitas air laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parameter kualitas air laut sesuai KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004 Lampiran III</li> </ul>	Operasional unit PLTU	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <p>Pengambilan contoh air laut secara <i>duplo</i> pada kedalaman 1-2 m (permukaan) dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN</p>	6° 46' 51.694" LS	6 (Enam) bulan sekali selama operasional unit PLTU untuk air laut	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Parameter kualitas limbah cair sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 Lampiran I</li> </ul>		<p>pengambilan sampel air limbah secara <i>duplo</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b></p> <p>Membandingkan data hasil pemantauan dengan baku mutu yang berlaku.</p>	<p>Di perairan laut pada koordinat</p> <p><u>Lokasi 1</u> 108° 37' 45.144" E 6° 46' 11.905" S</p> <p><u>Lokasi 2</u> 108° 37' 56.034" E 6° 45' 49.081" S</p> <p><u>Lokasi 3</u> 108° 37' 41.793" E 6° 44' 42.373" S</p> <p><u>Lokasi 4</u> 108° 37' 28.057" E 6° 45' 45.261" S</p> <p><u>Lokasi 5</u> 108° 37' 45.058"E 6° 46' 5.565" S</p>				
9.	Perubahan komunitas biota laut (gangguan terhadap biota laut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur komunitas biota laut (bentos dan nekton) setara dengan kondisi awal</li> </ul>	Operasional unit PLTU	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <p>- Pengumpulan contoh bentos menggunakan <i>grab sampler</i> sebanyak 3 contoh di setiap titik, kemudian</p>	<p>Di perairan laut pada koordinat</p> <p><u>Lokasi 1</u> 108° 37' 45.144" E 6° 46' 11.905" S</p> <p><u>Lokasi 2</u></p>	6 (enam) bulan sekali selama operasional unit PLTU	PT. CEPR	Dinas perikanan & kelautan Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				diidentifikasi sampai ke taksa terendah.  Inventarisasi jenis nekton laut hasil tangkapan nelayan setempat  <b>Metode Analisis Data :</b> Menganalisis bentuk di laboratorium (nama jenis dan jumlah individu setiap jenis, indeks keanekaragaman, indeks dominansi, dan indeks pemerataan) Mengevaluasi perubahan hasil tangkapan ikan dan jenis tangkapan ikan nelayan dari waktu ke waktu	108° 37' 56.034" E 6° 45' 49.081" S Lokasi 3 108° 37' 41.793" E 6° 44' 42.373" S Lokasi 4 108° 37' 28.057" E 6° 45' 45.261" S Lokasi 5 108° 37' 45.058"E 6° 46' 5.565" S  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat				
10.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul</li> <li>▪ jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan</li> </ul>	Operasional unit PLTU	<b>Metode pengumpulan data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei dengan wawancara mendalam.</li> <li>▪ Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti,</li> </ul>	6 (enam) bulan sekali selama masa operasi berlangsung.	PT. CEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kabupaten Cirebon</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BLHD Kab. Cirebon,</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dengan perusahaan		kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal  <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	dan Desa Pengarengan. ▪ Kantor PT. CEPR (bagian CSR)				
11.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja.</li> <li>▪ Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>	Operasional unit PLTU	<b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.  <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama masa operasi berlangsung.	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kabupaten Cirebon
12.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</li> </ul>	Operasional unit PLTU	<b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kabupaten Cirebon
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah keluhan terkait kegiatan operasional unit PLTU</li> </ul>		Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan operasional unit PLTU  <b>Metode Analisis Data :</b> Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Kantor PT. CEPR (bagian CSR)				
13.	Gangguan penyakit	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya	Operasional unit PLTU	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumpulan data</li> </ul>	Puskesmas setempat	Enam bulan sekali selama	PT. CEPR	Dinkes Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		ISPA)		<p>bulanan kasus penyakit dari Puskesmas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA);</li> <li>Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	operasional unit PLTU			Jabar
14.	Persepsi dan sikap masyarakat	<p>Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.</p> <p>Jumlah keluhan terkait kegiatan penyimpanan sementara abu batubara</p>	Penyimpanan sementara abu batubara	<p><b>Metode pengumpulan data :</b> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</p> <p>Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan penyimpanan sementara abu batubara</p> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</p> <p>Kantor PT. CEPR</p>	6 (enam) bulan sekali selama masa operasi berlangsung.	PT. CEPR	BLHD Kabupaten Cirebon	BLHD Kabupaten Cirebon
15.	Gangguan penyakit	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)	Penyimpanan sementara abu batubara	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data bulanan kasus penyakit dari Puskesmas;</li> </ul>	Puskesmas setempat	6 (Enam) bulan sekali selama penyimpanan sementara abu	PT. CEPR	Dinkes Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon & BPLHD Prov. Jabar

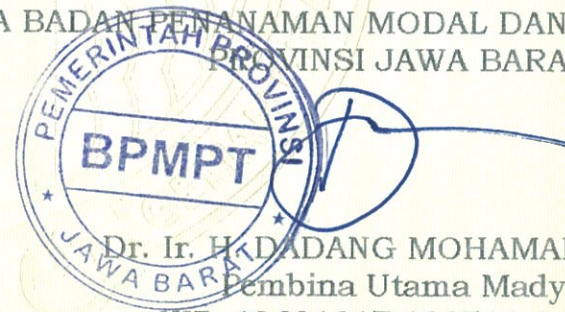


No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA);</li> <li>▪ Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	batubara			
<b>D. Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dipantau</b>									
1.	Penurunan kualitas air permukaan	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai aturan yang berlaku	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan sampel air permukaan secara <i>duplo</i> di outlet pengolahan air limbah dan badan air penerima dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN.</li> <li>▪ Pengambilan sampel air, pengawetan sampel dan analisis laboratorium dilakukan dengan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diterima</li> </ul>	Di titik penaatan izin pembuangan limbah cair (IPLC)	6 (enam) bulan sekali untuk badan air penerima dan 1 (satu) bulan sekali untuk outlet air limbah atau sesuai perijinan PPLH yang akan diberlakukan	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon & BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				secara ilmiah					
2.	Penurunan kualitas air tanah	Kualitas air tanah sesuai dengan kondisi awal	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan sampel air tanah di sumur pantau dan sumur penduduk dan kemudian dianalisis di laboratorium.</li> <li>▪ Pengambilan sampel air, pengawetan sampel dan analisis laboratorium dilakukan dengan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diterima secara ilmiah.</li> </ul> <p><b>Metode Analisis Data :</b> Membandingkan data hasil pemantauan dengan baku mutu kualitas air yang berlaku</p>	Tempat penyimpanan batubara di <i>stockyard</i> dan minimal satu sumur penduduk terdekat.	6 (Enam) bulan sekali selama Tahap Operasi atau sesuai perijinan PPLH yang akan diberlakukan untuk sumur pantau	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon & BPLHD Prov. Jabar
3.	Penurunan sanitasi lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sesuai dengan yang direncanakan, berupa: penyediaan tempat penampungan limbah padat (Tahap Konstruksi), <i>Sewage Treatment Plant (STP)</i> (Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja</li> <li>▪ Pembangunan jalan akses</li> <li>▪ Pembangunan PLTU dan fasilitasnya</li> </ul>	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi dokumentasi, meliputi foto.</li> <li>▪ Observasi lapangan</li> </ul>	Area PLTU	6 (enam) bulan sekali sejak Tahap Konstruksi dimulai	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon dan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dan Operasi), serta penampungan sampah non B3 (Tahap Konstruksi)		<b>Metode Analisis Data :</b> Analisis secara dekriptif kualitatif					
4.	Limbah B3	Parameter sesuai Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3	Kegiatan konstruksi & operasi PLTU	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> Mengacu pada Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3  <b>Metode Analisis Data :</b> Deskriptif kualitatif	Area PLTU	3 bulan sekali selama Tahap Operasi atau sesuai perijinan PPLH yang akan diberlakukan	PT. CEPR	BLHD Kab. Cirebon	BLHD Kab. Cirebon & BPLHD Prov. Jabar

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU  
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601217 198511 1 002